



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 21 November 2024

Halaman: 1

Pemprov DIJ Harus Bantu Pemkot Jogja

Walhi DIJ Minta Strategi Konkret Pengelolaan Sampah

JOGJA – Persoalan sampah di Kota Jogja kembali mengemuka usai Menteri Lingkungan Hidup (LH) Krida Hanif Faisol Nurofiq mendatangi Depo Mandala Krida. Pemkot Jogja disebut tak bisa menangani sampah sendiri. *Baca Pemprov... Hal 7*



Hingga saat ini belum ada langkah konkret yang menyeluruh untuk menangani pencemaran ini secara berkelanjutan." ELKI SETIYO HADI Kepala Divisi Kampanye Walhi Yogyakarta

Pemprov DIJ Harus Bantu Pemkot Jogja

Sambungan dari hal 1

"Persoalan ini tidak hanya tanggung jawab Pemkot Jogja semata, Pemprov DIJ juga harus ambil peran," ujar Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogjakarta, Elki Setiyo Hadi dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11).

Ia menilai kewenangan Pemkot Jogja sangat terbatas. Peran aktif Pemprov DIJ dibutuhkan dalam penyelesaian krisis pengelolaan sampah yang akut tersebut. "Apabila menteri lingkungan hidup serius, maka perlu sekiranya kementerian lingkungan hidup memberikan evaluasi yang menyeluruh termasuk

pada Pemprov DIJ," tuturnya.

Walhi Jogjakarta mendesak Menteri LH untuk mengevaluasi Pemprov DIJ dan membuat strategi konkret. TPST Piyungan, kata Elki, telah menjadi simbol kegagalan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Kebocoran limbah cair (lindi) dari TPST Piyungan terus mencemari lingkungan sekitar, dan berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

"Hingga saat ini belum ada langkah konkret yang menyeluruh untuk menangani pencemaran ini secara berkelanjutan," ujarnya.

Elki juga membeberkan masalah kebocoran lindi dan

penutupan TPST secara serampangan karena tidak adanya perencanaan. Itu seharusnya juga menjadi poin catatan Menteri LH kepada Pemprov DIJ. "Apabila Menteri LH serius, maka seharusnya bukan hanya depo di wilayah kota yang menjadi catatan, melainkan juga bagaimana tingkat pencemaran yang terjadi di sekitar TPST Piyungan," tandasnya.

Penutupan TPST Piyungan juga memunculkan permasalahan baru. Mulai dari penumpukan sampah di depo, kemunculan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di daerah Bantul hingga masifnya pembakaran sampah di wilayah padat pen-

diduk.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat mengatakan, Pemkot juga cenderung pelit dalam hal penganggaran soal penanganan sampah. Sehingga permasalahan sampah berupa penumpukan depo dan titik-titik sampah liar tidak kunjung ditangani.

Bahkan, untuk pembelian dua buah mesin insinerator pada tahun ini pun dananya juga bersumber dari pemerintah pusat. Sementara APBD Kota Jogja, disebut Sinarbiyat, belum pernah memiliki kontribusi untuk dituangkan dalam sebuah kebijakan anggaran. "Persoalan sampah

itu dananya kalau tidak dari pusat ya dari provinsi melalutai danais," ujar Sinarbiyat.

Politisi Partai Gerindra ini juga mendorong agar Pemkot bisa lebih banyak mengalokasikan anggaran penanganan sampah. Sebab dari pemerataan legislatif masih ada beberapa organisasi pe-

rangkat daerah yang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLIPA) cukup besar.

Dia pun turut menguliti besarnya anggaran belanja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang seharusnya memiliki tanggung jawab penanganan sampah.

Menurut Sinarbiyat, dengan belanja pegawai yang cukup besar sudah seharusnya sampah bisa ditangani. Namun fakta di lapangan masih banyak yang berserakan atau tidak ditangani. "Nanti di badan anggaran terus terang akan saya kritisi itu," tegas Sinarbiyat. (oso/inu/pr/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005